

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dengan adanya pembangunan nasional diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana dapat dilakukan dengan cara memperbaiki serta meningkatkan dari adanya jalan perekonomian yang sudah ada, agar nantinya bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang kemudian dapat pula untuk menata kehidupan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan. Dimana sasaran pembangunan ekonomi salah satunya yaitu untuk menurunkan tingkat kemiskinan Permasalahan mengenai kemiskinan didalam ekonomi adalah masalah yang sangat kompleks dan memiliki sifat yang multidimensial sehingga masalah ini harus diperhatikan betul-betul dan harus segera diselesaikan paling tidak dapat dikurangi. Sehingga upaya didalam pengentasan kemiskinan harus dilaksanakan dengan komprehensif dan dengan mengikutsertakan seluruh aspek didalam kehidupan masyarakat serta pelaksanaannya bisa dilakukan dengan terpadu (M. Nasir, dkk 2008).

Hingga saat ini kemiskinan masih menjadi suatu persoalan yang mendasar diberbagai pusat dan belahan negara manapun. Ketika seseorang atau kelompok masyarakat tidak mampu lagi dalam mencukupi kebutuhannya dengan baik maka hal tersebut akan menimbulkan kemiskinan, permasalahan itulah yang menjadikan munculnya kemiskinan di suatu daerah atau diberbagai negara. Kemiskinan merupakan keadaan seseorang ketika sudah tidak lagi memiliki uang atau hingga berkurangnya barang-barang untuk menjamin keberlangsungan hidupnya pada

saat sekarang atau yang akan datang. Dalam pemerintahan Indonesia kemiskinan merupakan permasalahan yang sangat penting untuk dihadapi, karena sampai saat ini pemerintah Indonesia belum cukup dalam mengatasi permasalahan kemiskinan yang terjadi di Indonesia. Bukan menjadi hal yang aneh ketika negara Indonesia masyarakatnya hidup berada pada garis kemiskinan dan ada pula yang berada dibawah garis kemiskinan karena indonesia merupakan salah satu negara yang tingkat kemiskinannya menempati posisi tertinggi diantara negara-negara dibelahan dunia (Octasari, 2016).

Masalah mendasar yang menjadi pusat perhatian pemerintah diberbagai negara manapun adalah masalah-masalah mengenai kemiskinan. Dimana biasanya standar hidup yang cenderung rendah berada diberbagai negara berkembang. Hal ini tentunya jauh berbeda apabila dibandingkan dengan golongan elit disetiap negara mereka sendiri atau dengan kata lain standar hidup orang-orang negara yang standar hidupnya jauh lebih kaya atau baik. Negara dikatakan dalam katagori miskin apabila tingkat pendapatannya rendah sehingga didalam negara tersebut akan terwujud standar hidup yang begitu rendah pula (Todaro, 2004).

Garis kemiskinan yang digunakan oleh setiap negara tentunya sudah ada batasan-batasan tersendiri begitu pula cara setiap negara dalam menentukannya, begitu juga di Indonesia. Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep dalam menentukan kemiskinan besaran rupiah yang dipergunakan untuk berbelanja per kapita selama satu bulan dalam rangka pemenuhan kebutuhan hidup baik minuman, makanan maupun kebutuhan hidup yang non-makanan. BPS menggunakan patokan 2.100 kilo kalori per hari untuk setiap orangnya dalam

pemenuhan kebutuhan makanan dan minumannya. Sedangkan menurut (Kuncoro, 2006) kebutuhan minum bukan makanan yang didalamnya meliputi pengeluaran sandang, perumahan, dan juga aneka barang dan jasa.

Pulau Jawa masih menduduki peringkat tertinggi untuk jumlah penduduk miskin di Indonesia, dimana menurut Badan Pusat Statistik (BPS) mencapai 14,79% juta orang penduduk miskin di pulau Jawa, sehingga disini dapat diketahui bahwa penduduk miskin di Indonesia masih terkonsentrasi berada di Pulau Jawa. Yang mana peringkat penduduk miskin tertinggi kedua di Indonesia maupun di Pulau Jawa adalah Provinsi Jawa Tengah yaitu dengan banyaknya penduduk miskin sebesar 4.493.750 jiwa. Kurangnya pemerintah didalam memperhatikan dan mengelola potensi wilayah yang dimiliki kecamatan sampai kedesa menjadikan 15 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah masuk kedalam zona merah yang mengakibatkan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah tinggi dan menjadi salah satu persoalan kemiskinan yang dihadapi pemerintah (Rahayu, 2017).

Tabel 1.1

Urutan Tingkat Kemiskinan di Indonesia Tahun 2013-2017

No	Provinsi	2013	2014	2015	2016	2017
1	Jawa Timur	4.771,26	4.786,79	4.786,79	4.703,30	4.617,01
2	Jawa Tengah	4.811,34	4.561,83	4.505,78	4.493,75	4.450,72
3	Jawa Barat	4.297,04	4.327,07	4.435,70	4.224,33	4.168,44
4	Lampung	1.163,06	1.142,92	1.163,49	1.169,60	1.131,73

5	Nusa Tenggara Timur	993,56	994,67	1.159,84	1.149,92	1.150,79
---	---------------------	--------	--------	----------	----------	----------

Sumber : BPS Indonesia

Berdasarkan tabel data dari BPS Indonesia menunjukkan jumlah penduduk miskin pada tahun 2013-2017 di Indonesia yang tertinggi adalah provinsi Jawa Timur, dan provinsi Jawa Tengah menduduki peringkat kedua setelah Jawa Timur. Berbagai macam faktor-faktor yang mempengaruhi dan berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya menjadikan masalah kemiskinan semakin kompleks. Yang dimana terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah yaitu Indeks Pembangunan Manusia (IPM), PDRB, Jumlah penduduk, dan Tingkat Pengangguran (BPS, 2017).

Tabel 1.2

Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2017

Tahun	Indeks Pembangunan Manusia (%)
2013	68.02
2014	68.78
2015	69.49
2016	69.98
2017	70.52

Sumber : BPS Jawa Tengah

Salah satu faktor yang mengakibatkan kemiskinan di berbagai daerah adalah kualitas sumber daya manusia, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi ukuran dalam kualitas sumber daya manusia untuk melihat tingkat kemiskinan. Terdapat 3 indikator yang menjadi komposisi dalam Indeks Pembangunan Manusia (IPM) diantaranya adalah kesehatan, standar kehidupan, dan pendidikan (Hakim, 2002).

Sesuai hasil data dari BPS yang terdapat pada grafik tabel 1.2 tersebut menunjukkan bahwa IPM di Provinsi Jawa Tengah mengalami peningkatan secara menerus disetiap periodenya yakni 2013-2017. Yang dimana tingkat IPM tertinggi pada tahun 2017 mencapai angka sebesar 70.52% dan tahun 2013 adalah IPM terendah sebesar 68.02%.

Tabel 1.3

Total PDRB Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013-2017

Tahun	PDRB (Juta)
2013	726.655.118,06
2014	764.959.150,95
2015	806.775.362,19
2016	849.383.564,59
2017	894.050.472,53

Sumber : BPS Jawa Tengah

Menurut Saberhan, (2002) PDRB adalah kegiatan aktivitas ekonomi dari berbagai wilayah yang kemudian dapat menghasilkan nilai tambah. Pembangunan

ekonomi disetiap tahunnya dapat dilihat dari gambaran pemerintah dalam pembangunan ekonominya yaitu dari PDRB. Ketika PDRB mengalami kenaikan secara terus-menerus yang tentunya juga disertai dengan perbaikan kualitas hidup didalam masyarakatnya maka pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Tengah dapat dikatakan memberikan hasil yang optimal. Dapat dilihat sesuai hasil data pada BPS grafik tabel 1.3 menunjukkan bahwa tingkat PDRB Provinsi Jawa Tengah dari tahun 2013-2017 mengalami peningkatan secara signifikan. Yang dimana peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 894.050.472,53.

Selain itu, faktor lain yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan di suatu daerah juga dapat disebabkan dari adanya jumlah penduduk diwilayah tersebut.

Kesejahteraan masyarakat dapat tidak tercapai dan tidak sesuai dengan harapan walaupun dengan adanya pembangunan ekonomi, karena adanya pertumbuhan penduduk yang tidak terkendali. Pembangunan ekonomi menjadi terhambat ketika terjadi pertumbuhan penduduk yang tidak bisa dikendalikan, dengan adanya hal tersebut maka disini terlihat bahwa tingkat kemiskinan juga dipengaruhi oleh laju pertumbuhan penduduk di wilayah tersebut.

Tabel 1.4

Jumlah Penduduk di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2017 (Juta jiwa)

Tahun	Jumlah Penduduk
2013	33.264.339

2014	33.522.663
2015	33.774.141
2016	34.019.095
2017	34.257.865

Sumber : BPS Jawa Tengah

Sesuai data pada grafik tabel 1.4 diatas menunjukkan bahwa, jumlah penduduk di Provinsi Jawa Tengah pada setiap tahunnya yaitu dari tahun 2013-2017 terus mengalami peningkatan yang signifikan. Dimana pada tahun 2013 sebesar 33.264.339 tahun 2014 sebesar 33.522.663 tahun 2015 sebesar 33.774.141 tahun 2016 sebesar 34.019.095 dan pada tahun 2017 sebesar 34.257.865.

Pengangguran juga menjadi salah satu faktor lain yang berpengaruh terhadap tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah. Dimana untuk mengetahui ukuran kemiskinan disuatu masyarakat dapat dilihat dari kemakmuran tingkat pendapatannya. Ketika kondisi dari tingkat penggunaan tenaga kerja penuh (*full employment*) terwujud, maka akan berdampak positif pada pencapaian pendapatan masyarakat yang semakin maksimum. Tingkat kemakmuran dapat berkurang apabila terjadi banyak pengangguran karena dengan adanya pengangguran masyarakat otomatis akan mengalami penurunan terhadap pendapatannya, sehingga akan dapat menimbulkan masalah kemiskinan yang diikuti dengan tingkat kemakmuran masyarakat yang berkurang (Sadono Sukirno, 2003).

Tabel 1.5

Tingkat Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah

Tahun 2013-2017

Tahun	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)
2013	6.01
2014	5.68
2015	4.99
2016	4.63
2017	4.57

Sumber : BPS Jawa Tengah

Dapat dilihat pada tabel 1.5 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah pada tahun 2013-2017 mengalami penurunan yang signifikan. Pada tahun 2013 tingkat pengangguran terbuka di Jawa Tengah mencapai 6.01% dan pada tahun berikutnya 2014 mengalami penurunan sebesar 5.68%, kemudian pada tahun 2015 sebesar 4.99%, mengalami penurunan berturut-turut hingga tahun 2016-2017 yaitu sebesar 4.63% dan 4.57%.

Ketika disuatu daerah mengalami tingkat pertumbuhan angkatan kerja yang relatif cepat namun diikuti dengan tingkat pertumbuhan lapangan kerja yang relatif lambat pula maka disitulah keadaan akan terjadinya tingkat pengangguran terbuka. Berhasil atau tidaknya pembangunan disuatu negara dapat dilihat dari cerminan tingkat pengangguran di negara tersebut apakah tinggi atau rendah, ketika di negara tersebut terjadi ketidakseimbangan antara jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan jumlah angkatan kerja yang ada, maka negara itu akan mengalami tingkat pengangguran yang relatif tinggi. Keadaan dimana penduduk tidak lagi produktif yang diikuti dengan semakin meningkatnya pengangguran yang pada akhirnya menimbulkan tingkat kemiskinan tinggi dengan keadaan

penduduk tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat pengangguran berpengaruh positif terhadap tingkat kemiskinan.

1.2 Batasan Masalah

Dengan meneliti masalah apa saja yang menjadi faktor-faktor dalam mempengaruhi tingkat kemiskinan di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah penulis juga akan membatasi masalah dalam penelitiannya. Penelitian ini menggunakan metode analisis data panel yang terdiri dari data crosssection sejumlah 175 observasi dan data time series dari tahun 2013-2017. Adapun beberapa variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya mencakup indeks pembangunan manusia, PDRB, investasi swasta, dan tingkat pengangguran.

1.3 Rumusan Masalah

Masalah kemiskinan adalah masalah utama yang selalu terjadi di berbagai negara berkembang dan harus ditangani. Sehingga wajar saja apabila negara Indonesia tingkat kemiskinannya masih relatif tinggi, karena Indonesia termasuk negara yang masih berkembang. Maka berdasarkan uraian latar belakang yang sudah dibuat rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah Indeks Pembangunan Manusia berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2013-2017?
2. Apakah PDRB berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2013-2017?
3. Apakah Jumlah Penduduk berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2013-2017?

4. Apakah tingkat Pengangguran berpengaruh terhadap kemiskinan di Jawa Tengah pada tahun 2013-2017?

1.4 Tujuan Peneliti

Maka tujuan dari penelitian ini jika dilihat berdasarkan pemaparan latar belakang dan rumusan masalah diatas adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Indeks Pembangunan Manusia terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
2. Untuk mengetahui pengaruh PDRB terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
3. Untuk mengetahui pengaruh jumlah penduduk terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.
4. Untuk mengetahui pengaruh pengangguran terhadap kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

1.5 Manfaat Penelitian

Adapun beberapa manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini agar dapat berguna dan memberi kontribusi yaitu:

1. Bagi penulis, diharapkan penelitian ini bermanfaat dalam menambah pengetahuan tentang berbagai faktor pengaruh apa saja dan juga perbedaan apa saja yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan. Tidak ada hanya itu, penelitian ini juga sebagai salah satu syarat dalam mendapatkan gelar Sarjana di Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia khususnya dalam jurusan Ilmu ekonomi.

2. Bagi pengambil kebijakan, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi berguna dalam bagaimana memahami faktor-faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kemiskinan sehingga dapat diketahui apa saja yang menjadi pemicu dalam kemiskinan dan bagaimana untuk mengatasi masalah kemiskinan yang ada.
3. Bagi masyarakat umum, diharapkan dapat menjadi sumber pengetahuan dan khususnya dalam perekonomian agar dapat memahami faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kemiskinan di Indonesia khususnya di Jawa Tengah.

